

Berita	: Manajemen Anggaran Buruk
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.4
Edisi	: Jumat, 17 November 2017

Manajemen Anggaran Buruk

Dewan Kritik Kinerja Pemkot Bandung

BANDUNG, (PR).-

DPRD Kota Bandung menyoroti buruknya manajemen anggaran Pemerintah Kota Bandung sepanjang 2017. Yang paling dirugikan adalah warga Kota Bandung yang tidak terlayani secara optimal.

Sorotan atas buruknya manajemen anggaran Pemkot Bandung mengemuka dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Kamis (16/11/2017) siang. Dalam pandangan umum setiap fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2017, para anggota dewan bergiliran menyampaikan kritik mereka.

Rieke Suryaningsih sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menyebut banyaknya paket lelang proyek strategis yang gagal. Ditambah lagi tidak tercapainya target besaran pendapatan asli daerah, terutama untuk mata pajak reklame dan retribusi parkir. Kegagalan-kegagalan itu diyakini bakal berdampak pada pencapaian target Pemkot Bandung sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti potensi besaran sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2017. Besarannya ditaksir di kisaran Rp 400 miliar.

"Silpa ini bukan prestasi karena kebijakan efisiensi, tetapi lebih karena lemahnya perencanaan. Banyaknya gagal lelang memengaruhi capaian target RPJMD," ujar Rieke.

Sementara itu, Fraksi Gerindra

memberikan sorotan serupa. Mereka mengkritik pembahasan perubahan APBD 2017 yang baru dimulai pada pertengahan November. Tahun lalu pembahasan sudah dimulai sejak Oktober. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2017 itu mereka sebut sebagai "pembahasan yang paling tidak realistis".

Fraksi-fraksi lain yang memberikan pandangan juga melontarkan pernyataan serupa. Mereka merasa pengelolaan anggaran tahun 2017 jauh dari optimal. Para anggota dewan berharap agar keterlambatan pembahasan anggaran tidak menja-

di tradisi yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Keterlambatan pembahasan anggaran, diyakini para anggota dewan, bakal berdampak panjang. Selain mutu anggaran yang tidak optimal, serapannya pun bisa jauh dari target. Yang paling dirugikan adalah warga kota yang tidak bisa menikmati produk-produk pembangunan.

Ade Fahrurroji, juru bicara Fraksi Hanura, mengingatkan agar kinerja layanan publik, termasuk manajemen anggaran, tidak akan terpengaruh oleh tahun politik. Sebagaimana diketahui, tiga pucuk pimpinan

Pemkot Bandung, mulai dari wali kota, wakil wali kota, hingga sekretaris daerah menyatakan diri bakal maju dalam pilkada mendatang.

"Kita tahu tahun depan tahun politik. Tiga pimpinan maju sehingga ada pergerakan tinggi. Tapi jangan sampai ini berdampak buruk pada kinerja Pemkot Bandung dalam layanan publik," tuturnya.

Hati-hati

Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menyatakan, keterlambatan pembahasan anggaran disebabkan oleh komitmen Pemkot Bandung mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Salah satunya adalah keputusan melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kami ingin lebih hati-hati, tetapi memang tidak bisa dimungkiri ada hal-hal yang membuat kebijakan (anggaran) tidak berjalan baik. Dulu kita tidak pakai TP4D. Kita mulai (pakai TP4D), jadi harus ada adaptasi," katanya.

Tentang banyaknya gagal lelang, Oded juga menyebut ada beberapa variabel selain persoalan kinerja para pegawai pemkot. Salah satunya adalah permasalahan pada pihak ketiga yang masih harus menyesuaikan dengan aturan-aturan baru yang membuat proses lelang lebih transparan.

Oded menyatakan, ia telah melakukan evaluasi dengan dinas-dinas yang memiliki anggaran besar. Ia sepakat mutu pengelolaan anggaran harus terus diperbaiki dari tahun ke tahun. **(Tri Joko Her Riadi)*****